

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut Tiongkok Selatan (LTS) menyimpan banyak kekayaan alam yang melimpah, dengan minyak bumi dan kekayaan laut begitu luar biasa tersebut hingga hal tersebut, membuat LTS menjadi perdebatan strategis di seluruh dunia. Hal tersebut karena LTS merupakan perairan yang dinilai memiliki potensi besar karena mengandung gas alam dan minyak, jalur pelayaran, perdagangan dan minyak dunia. Dengan daratan dan perairan yang menutupi nusantara yang luas, sejarah dominasinya silih berganti dengan daratan di sekitarnya. Saat ini, beberapa negara seperti Taiwan, Tiongkok, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Terlibat dalam upaya saling mengklaim wilayah, bahkan dampak dari klaim tersebut melanggar kapal patroli di beberapa negara bagian dari Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok terhadap perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Djuyandi, Illahi, & Aurel, 2021, pp. 112-114)

LTS merupakan konflik yang secara tidak langsung melibatkan Tiongkok, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), serta nelayan tradisional yang berada di sekitar kawasan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel sejak 200 tahun Sebelum Masehi (SM). Dengan diketahui bahwa kedua pulau tersebut telah ada sejak 200 SM, Tiongkok membuat klaim bahwa kedua pulau tersebut telah berada sejak dinasti sebelumnya, Tiongkok juga mengklaim telah menemukan peninggalan kuno di kedua pulau

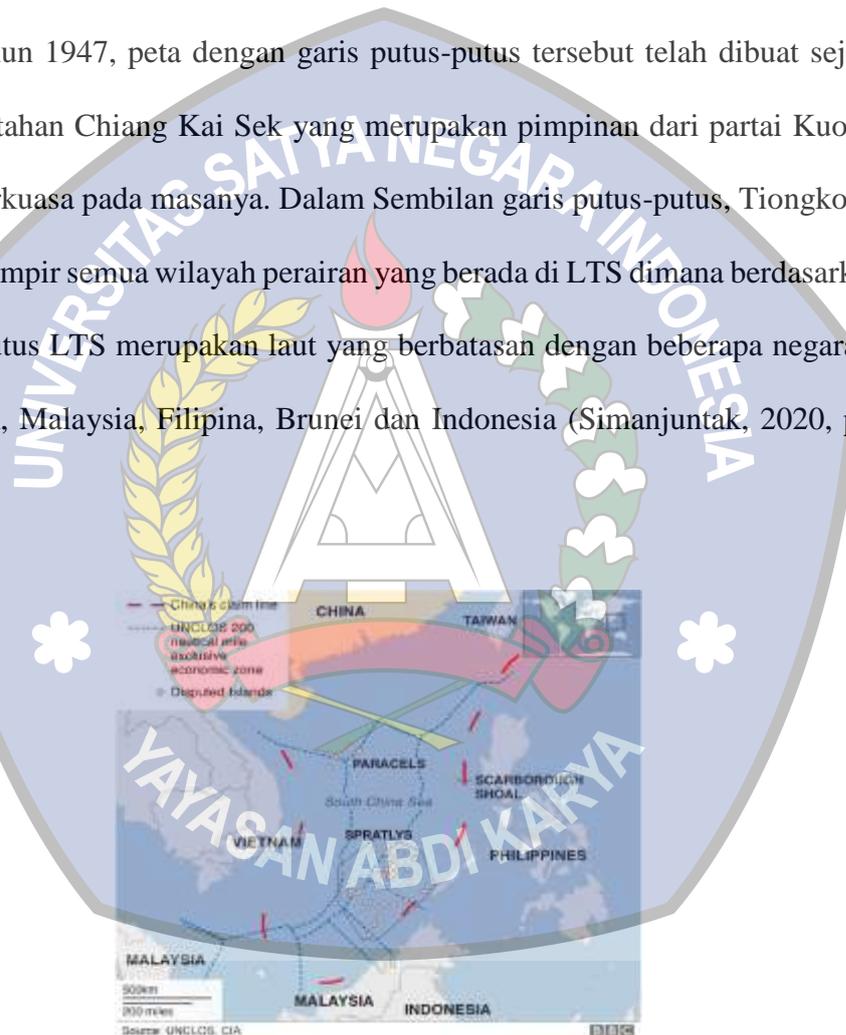
tersebut berupa kapal kuno dan uang kertas. Selain itu, menurut sisi Tiongkok bahwasannya nama “Laut Tiongkok Selatan” berasal dari nenek moyang mereka, dan menurut catatan dinasti Song dan Yuan kedua pulau tersebut telah termasuk dalam wilayah kekuasaan dinasti Tiongkok (Junef, 2018).

Klaim-klaim yang dilakukan Tiongkok tersebut bukan tanpa sebab dihembuskan oleh pihak Tiongkok, bahkan Tiongkok cukup agresif dalam melakukan klaim-klaim tersebut, karena didasari oleh fakta bahwa LTS merupakan wilayah yang memiliki potensi kekayaan laut yang besar, baik dari segi hasil laut maupun pertambangan lepas pantai. Tiongkok juga telah melakukan riset untuk hal tersebut, riset tersebut membuat Tiongkok cukup optimis dengan keberadaan 213 miliar barel minyak atau sekitar lebih dari 10 kali cadangan minyak Amerika Serikat. Menurut Administrasi Informasi Energi (AIE), cadangan terbesar di kawasan ini adalah gas alam, yang setara dengan cadangan minyak Qatar dengan perhitungan sekitar 900 Triliun kaki kubik (Castro, 2015).

Konflik di LTS merupakan konflik antar negara. Pasalnya, pihak yang mengklaim bukan hanya negaranya saja, melainkan negara lain yang berkepentingan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa maritim di LTS tidak hanya dari aspek sejarah dan hukum, tetapi juga melalui pendekatan perundingan damai. (Asnani & Rizal, 1997). Sengketa LTS merupakan sengketa yang cukup berkepanjangan di Asia, hal ini bermula dengan klaim-klaim dari Tiongkok terhadap wilayah negara lain termasuk Filipina sebagai salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara pun tidak luput dari sasaran klaim Tiongkok tersebut, Tiongkok secara spesifik mengklaim wilayah Laut di sebelah barat

Filipina. Dalam melakukan klaim terhadap LTS, Tiongkok melakukan berdasarkan pada sejarah panjang yang dimiliki Tiongkok dan dipatenkan oleh Tiongkok ke dalam bentuk *Nine Dash Line* (Numadi, 2018, pp. 250-267).

Nine Dash Line atau Sembilan garis putus-putus merupakan wujud peta yang sudah disederhanakan dari *Eleven Dash Line* atau sebelas garis putus-putus pada tahun 1947, peta dengan garis putus-putus tersebut telah dibuat sejak masa pemerintahan Chiang Kai Sek yang merupakan pimpinan dari partai Kuomintang yang berkuasa pada masanya. Dalam Sembilan garis putus-putus, Tiongkok mengklaim hampir semua wilayah perairan yang berada di LTS dimana berdasarkan garis putus-putus LTS merupakan laut yang berbatasan dengan beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei dan Indonesia (Simanjuntak, 2020, pp. 150-162).



1.1 Peta Sembilan garis putus-putus (Sumber: UNCLOS, CIA)

Seperti diketahui bahwa Tiongkok memulai klaimnya di Laut Tiongkok Selatan dan memberikan ancaman kedaulatan bagi Filipina dimulai sejak tahun 2010

dimana pada tahun tersebut bertepatan pada terpilihnya Presiden Filipina 2010 yaitu Presiden Benigno Aquino III yang merupakan Presiden Filipina ke-15, Aquino sendiri adalah anggota yang sekaligus diusung oleh Partai Liberal Filipina dalam pemilihan Presiden 2010 (Albert, 2021). Pada tahun bersamaan Aquino mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan sebagai bentuk kecaman dan perlindungan diri atas klaim maritim Tiongkok yang secara masif terjadi di LFB. Mengatasi klaim maritime Tiongkok yang cukup masif tersebut Aquino menggandeng *Armed Forces of the Philippines* (AFP) (De Castro, 2017).

Pada masa pemerintahan Aquino III, Filipina menanggapi dengan sangat tegas dan konsisten klaim Tiongkok atas LTS. Filipina pada masa Aquino memiliki kecenderungan untuk meminta bantuan dalam bidang keamanan dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu terpenting dari Filipina. Penandatanganan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) merupakan bentuk kerjasama kedua negara. Aquino telah menerapkan kerja sama ini untuk melemahkan dan mengurangi pengaruh Tiongkok di LTS, yang telah membantu Aquino memastikan keamanan lebih dan pertahanan Filipina (Beatrice, 2020, pp. 104-121).

Hubungan kerja sama di dalam bidang militer antara kedua negara tersebut mempunyai sejarah yang panjang, di mana terdapat *Visiting Forces Agreement* (VFA) yang ditandatangani pada tahun 1999. Melalui perjanjian tersebut, Filipina memperoleh bantuan dari Amerika Serikat di dalam bidang militer untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya dari ancaman. Perjanjian ini membuat kemampuan dan kekuatan militer Filipina meningkat, karena adanya pelatihan bersama dengan tentara Amerika Serikat yang berada sementara di Filipina,

tujuannya untuk memberikan peningkatan di dalam peralatan persenjataan dan pelatihan. Maka dari itu kekuatan yang dimiliki oleh Filipina tidak dapat terlepas dari keberadaan dan campur tangan dari pihak Amerika Serikat (Beatrice, 2020, pp. 104-121).

Sehubungan dengan hubungan militer antara Filipina dan AS, Benigno Aquino mulai menerapkan kerjasama EDCA. Bantuan yang diberikan oleh AS berupa pengiriman tentara ke Filipina, dan Filipina memberikan izin kepada militer AS untuk mengakses kembali pangkalan militer di Filipina dengan tujuan untuk membantu menjalankan pengawasan terhadap dinamika LTS. Hal ini membuat Filipina membuka kembali pangkalan militer AS di Filipina yang sebelumnya ditutup pada tahun 1991 Aquino, membawa sengketa di LTS ke Pengadilan Arbitrase Internasional, dan Filipina memenangkan kasus tersebut. Duterte lebih memilih diskusi bilateral dengan Tiongkok dan lebih mendukung insiden yang berkaitan dengan LTS (Department of Foreign Affairs Philippines, 2016).

Strategi berikutnya yang dilakukan pada masa kepemimpinan Aquino adalah membawa sengketa dengan Tiongkok ini ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda pada bulan Januari 2013. Mahkamah Arbitrase memberikan keputusan pada tanggal 12 Juli 2016 terhadap tuntutan yang dilakukan oleh Filipina mengenai sengketa LTS, berisi tentang klaim Tiongkok berdasarkan hak historis yang berhubungan dengan wilayah maritim di LTS dengan nama *nine dash line* bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Walaupun Filipina memenangkan gugatan, Tiongkok menolak dan tidak mengakui keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase karena keputusan tersebut tidak

memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga penolakan dari Tiongkok memengaruhi hubungan dengan Filipina. Hal ini menyebabkan ketegangan di masa mendatang yang akan dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Ranada, 2016, p. 12).

Namun demikian, ketika pergantian presiden dari Aquino ke Duterte, hubungan antara Filipina dan Tiongkok mengalami perubahan, di mana terdapat respon yang sangat bertolak belakang antara Aquino dan Duterte dalam menyikapi klaim Tiongkok terhadap LTS. Duterte mengutamakan peningkatan bentuk kerja sama bilateral antara Filipina dan Tiongkok untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di LTS. Duterte melakukan kerja sama dengan Tiongkok karena Filipina tidak mempunyai fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai (Ranada, 2016, p. 12).

Aquino menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih konfrontatif. Di sana, ia bekerja dengan AS untuk meningkatkan pertahanan dan entah bagaimana dengan Angkatan Darat Filipina untuk menekan Tiongkok, serta melalui jalur hukum dengan membawa sengketa ini ke Mahkamah Arbitrase pada tahun 2013, Duterte lebih menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bersifat damai, di mana Filipina melakukan kerja sama bilateral dengan Tiongkok di dalam mengelola sumber daya di LTS.

LTS merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang tinggi, terutama minyak dan sumber energi lainnya, dikelilingi oleh gugusan beberapa pulau, Tiongkok, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei. Hak mutlak atas seluruh perairan LTS, yang secara tiba-tiba diluncurkan oleh

pemerintah Tiongkok pada tahun 2012, juga memiliki wilayah untuk pengelolaan, stabilitas, dan keamanan masa depan perairan teritorial negara-negara sekitarnya yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Sebagai negara asing. Sejak itu, kekhawatiran yang meningkat telah meningkatkan ketegangan melalui latihan militer, kekuatan militer, provokasi dan intimidasi di perairan dan wilayah diplomatik. Selain itu, tindakan agresif dan berbagai provokasi terhadap Angkatan Laut Tiongkok dan nelayan Filipina di perairan LTS telah menyebabkan konflik dengan intensitas rendah (Nainggolan, 2013).

Konflik antara Tiongkok dan Filipina terjadi pada tahun 1982. Saat itu, Filipina mengklaim bahwa Kepulauan Spratly adalah bagian dari perairan teritorialnya, berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa seharusnya berjarak 200 mil (321 km) dari garis pangkal untuk mengukur dasar ZEE. Luas wilayah perairan. Negara anggota ASEAN adalah Filipina dan Tiongkok. Sebagai contoh, Filipina telah mengeluarkan berbagai laporan pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok yang melintasi daerah konflik, bahkan telah terjadi insiden antara kapal patroli Tiongkok dengan kapal penangkap ikan Filipina.

Tiongkok mendominasi Kepulauan Spratly dan Paracel dan bersedia mendirikan pangkalan angkatan laut di pulau-pulau ini. Mereka mengusir nelayan Filipina dari selendang Scarborough 200 mil dari Palawan. Tak berhenti sampai di situ, Angkatan Laut Tiongkok memperkuat armadanya dengan kapal induk Liaoning dan sengaja melancarkan perang dengan nelayan Tiongkok sebagai perpanjangan tangan “agen” mereka. Bahkan Filipina telah mengajukan gugatan ke

Mahkamah Arbitrase Internasional, dan kemenangan atas Tiongkok disambut baik oleh Vietnam, namun Tiongkok tidak menyetujui keputusan tersebut (Junef, 2018).

Klaim teritorial nasional didasarkan pada prinsip landas kontinen, termasuk Kepulauan Spratly. Ada delapan pulau di Kepulauan Spratly, di mana Palawan juga merupakan bagian dari Filipina. Filipina juga memiliki istilah sendiri untuk bagian yang diklaim dari LTS, LFB. Filipina melihat kebutuhan untuk memobilisasi lebih banyak kekuatan melalui perjanjian keamanan lainnya, mencari bantuan keamanan dari AS. Perjanjian Pertahanan Bersama, yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1951, meletakkan dasar untuk memperkuat aliansi keamanan yang berfokus pada konflik di LTS (Emmers, 2014).

Menurut AS, LTS belum menjadi keputusan teritorial Filipina. Kebijakan tersebut akhirnya berbalik ketika Tiongkok melakukan tindakan provokatif dan tegas berupa insiden misterius di LTS pada tahun 2009. Tiongkok telah membentuk unit militer elit untuk memperkuat klaimnya di milisi Laut Tiongkok Selatan, salah satu dari tiga kekuatan laut Tiongkok. Mayoritas milisi maritim sebenarnya adalah milisi paruh waktu, yang pekerjaan utamanya adalah nelayan. Namun, ia dilengkapi dengan peralatan khusus dan dapat digunakan kapan pun diperlukan (Batista, 2007).

Filipina telah mengajukan protes diplomatik terhadap Tiongkok terhadap dugaan kehadiran ilegal kapal Tiongkok di perairan Filipina, meskipun dipantau oleh anggota milisi. Ratusan kapal Tiongkok yang diyakini oleh milisi LTS telah tersebar di wilayah yang lebih luas. Satuan Tugas LTS di Filipina telah menyatakan keprihatinan mendalam atas kehadiran ilegal milisi maritim Tiongkok yang terus

berlanjut. Para diplomat Tiongkok mengatakan kapal itu dilindungi dari laut yang ganas dan tidak ada milisi di dalamnya. Pemerintah Filipina sedang mempromosikan strategi yang terdiri dari tiga Upaya. Upaya pertama adalah meningkatkan anggaran militer, melaksanakan program modernisasi pertahanan, dan mengalihkan fokus Angkatan Darat Filipina (ADF), ke arah eksternal dan maritim yang ada keamanannya, yaitu mengembangkan Filipina (Greitens, 2016).

Kehadiran AS di daerah konflik secara umum sejalan dengan kerjasama pertahanan militer yang dibentuk antara AS dengan Vietnam dan Filipina untuk mengekang sikap ofensif Tiongkok yang dianggap melanggar hukum maritim internasional. Agresi yang berkembang dari Tiongkok telah membuat AS mendukung sekutunya. Seperti nota kesepahaman dengan AS antara Vietnam dan Filipina. Latihan militer bersama dan pengerahan armada dari pangkalan angkatan laut ke AS di Pasifik juga sedang dipersiapkan untuk kewaspadaan di wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel. (Fahira, 2020, p. 73)

Tiongkok membutuhkan armada yang kuat dan landasan strategis, karena latar belakang pertahanan dan keamanan Tiongkok di LTS adalah kelemahan kekuatan angkatan laut, yang dapat mempromosikan imperialisme barat. Sikap defensif di LTS terkait dengan niat Tiongkok untuk memperoleh status kekuatan maritim baik lokal maupun internasional. Untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di LTS, Tiongkok melakukan pekerjaan reklamasi dan konstruksi pada tahun 2014 di Kepulauan Spratly, South Johnson Reef, Cuateron Reef, Gaven Reef dan banyak lagi (Pinotti, 2015)

Tujuan dari pengaduan tersebut adalah untuk memperkuat dugaan kedaulatan teritorial Tiongkok, meningkatkan kondisi kehidupan penduduk setempat, berkontribusi pada keamanan pelayaran internasional, dan meningkatkan prediksi kekuatan militer. Wilayah Kepulauan Spratly sangat penting untuk pertahanan. Digunakan sebagai tempat untuk memantau atau mencegah semua kegiatan militer di negara lain. Sebelum reklamasi di Kepulauan Spratly, Tiongkok melakukan reklamasi dan membangun pelabuhan di Kepulauan Parcel, dan membangun fasilitas berupa gedung administrasi (Shinji, 2016).

Bertentangan dengan pembangunan beberapa pangkalan militer dan pulau-pulau seperti yang dijelaskan dalam deklarasi aksi, karena Tiongkok memberikan tekanan untuk secara langsung mempengaruhi konflik menuju kerja sama dan membangun kepercayaan di Filipina Menentang kegiatan Tiongkok. Dianggap sikap kuat Tiongkok terhadap Filipina adalah komitmen penuh keyakinan terhadap Tiongkok, bukan konsensus ASEAN. Karena Filipina dipandang sebagai ancaman keamanan bagi Tiongkok (Yunling & Yuzhu, 2012).

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang terjadi, maka penulis mengidentifikasi bahwa di bawah kepemimpinan Duterte, Filipina masih bersikap kooperatif terhadap Tiongkok walaupun Tiongkok telah melakukan tindakan provokatif secara terus-menerus di Laut Filipina Barat. Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan ini layak diangkat menjadi suatu penelitian karena keputusan Duterte berdampak terhadap beberapa pihak, terutama negara-negara yang terlibat secara langsung dalam sengketa LTS, seperti Tiongkok,

Vietnam, Malaysia, dan Brunei maupun negara yang tidak terlibat secara langsung dalam sengketa ini, seperti AS.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana respon Filipina terhadap agresivitas Tiongkok di Laut Filipina Barat pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respon Filipina terhadap agresivitas Tiongkok di Laut Filipina Barat pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu, khususnya disiplin Ilmu Hubungan Internasional dan dapat memberikan kontribusi dalam menganalisis bagaimana suatu negara membuat keputusan untuk merespon sikap yang ditunjukkan oleh negara lain. Kemudian sebagai acuan dalam menganalisis konflik ataupun isu terkait sengketa perairan atau kelautan antar negara.

penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, temuan penelitian serta pembahasan mengenai runutan permasalahan yang ada. Mulai dari bagaimana implementasi setiap teori dalam dari sisi Filipina, lalu bagaimana keamanan maritim, *security dilemma* dan hedging dalam menjelaskan respon agresivitas Tiongkok yang dilakukan oleh Filipina, dengan demikian pembaca dapat dengan mudah mengetahui isu ini dengan cukup jelas dan detail.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.